

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia Budi.
- Arikunto, Suharsini. (2005). *Manajemen Penelitian*. Bandung: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada.
- Dye, T. R. (1992). *Understanding Public Policy Seventh Edition*. New Jersey: Prentice.
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu Group.
- Kasmad, Rulinawaty. (2018). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara.
- Herabudin. (2016). *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi ke Implementasian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Krismartini. (2019). *Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar)*. Semarang.
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT: Elex Media Komputindo.
- Semiawan, Cony R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3SE.
- Sopiah, D. M. (2010). *Metodologi Penelitian - Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Subarsono. (2006). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan TRansparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah*. Jakarta Pusat: FISIP Univ Moestopo Beragama (Pers).
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus (Edisi dan Revisi Terbaru)*. Yogyakarta: CAPS.
- Zakaria, Mochamad dan Makbul Mansyur. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik Strategi Kebijakan untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Skripsi dan Jurnal-Jurnal

- Aini, Wirdatul'. (2015). Keterlibatan Istri Nelayan dalam Menambah Penghasilan Keluarga di Kelurahan Pasie nan Tigo Kota Padang. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 15(1), 73-84
- Ariski, Yudi, and W G Pramita Ratnasari. (2022). "Peran Kelembagaan Lokal Dalam Aktivitas Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi UPTD Sentra Pengolahan Hasil Perikanan Pasia Nan Tigo) Pendahuluan" 10(1), 10–22.
- Fikri, Jamal. (2019). "Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir," *Jurnal Hukum*. 464–78
- Junaidi. (2017). *Profil Kemiskinan Nelayan Tradisional di Padang* (Bung Hatta University Press)
- Nurbaity, Dian Puteri. (2016). "Penataan Ruang Luar Kampung Nelayan Berbasis Pada Social -Activity (Studi Kasus: Kampung Nelayan Lapulu - Kota Kendari)" (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
- Retnowati, E. (2011). Nelayan indonesia dalam pusaran kemiskinan struktural (perspektif sosial, ekonomi dan hukum). *Perspektif*, 16(3), 149-159.
- Simanullang, Jubel Hot P, dan Fitri Eriyanti. (2019). "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Tangkap Oleh DKP Kota Padang Dalam Meningkatkan Pendapatan(Studi Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang).

Senasaputro, Bonifacio Bayu. (2012). Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Atma, dan Jaya Yogyakarta, “Konsep implementasi kebijakan penataan kawasan reklamasi pantai berwawasan lingkungan berkelanjutan,” 26–36

Wastuti, Ifriany Tri. (2014). “Strategi Arah Pengembangan Permukiman Nelayan berbasis Ekowisata di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Sinjai,”

Website

<http://dkp.sumbarprov.go.id/home/berita/2> dikutip pada 18 April 2022, Pukul 10:00 WIB

<https://www.unpad.ac.id/2020/09/menjadi-profesi-termiskin-di-indonesia-benarkah-nelayan-tidak-bisa-bahagia-dengan-profesinya/> dikutip pada 18 April 2022, Pukul 14:00 WIB

Perundang-Undangan dan Dokumen

Undang-undang no 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030

Peraturan Walikota Padang No 38 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Kampung Nelayan

Keputusan Walikota Padang No 286 Tentang Lokasi dan Tema Kampung Tematik Kota Padang Tahun 2021-2024

Renstra Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang Tahun 2019-2024

Master Plan Kampung Nelayan Pasie Nan Tigo Dinas Perikanan Dan Pangan Kota Padang Tahun 2020

Idikator Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang Tahun 2020-2021